



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

TAHUN 2025-2026

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis.....	14
1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis	14
1.4 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TAPANULI UTARA	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.....	17
2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara	17
2.1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara	23
2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara	24
2.2.1 Sumber Daya Manusia	24
2.2.2 Aset	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	30
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah	80
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	83
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TAPANULI UTARA	85

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara	85
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	88
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	88
3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 – 2024	88
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	89
3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	89
3.3.4 Telaahan Renstra Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	90
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	91
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	92
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	93
4.1 Tujuan.....	93
4.2 Sasaran	93
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	99
4.1 Strategi	99
4.2 Arah Kebijakan	100
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	104
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	116
BAB VIII PENUTUP.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Gap</i> antara Jumlah Pegawai Yang ada dan Kebutuhan Pengisian Formasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	24
Tabel 2.2 Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2024	25
Tabel 2.3	25
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Golongan Ruang Tahun 2024	25
Tabel 2.4 Pegawai BKPSDM Menurut Jenjang Eselon Tahun 2024	25
Tabel 2.5 Data Sarana Dan Prasarana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara	27
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara	31
Tabel 2.7 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.....	35
Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023.....	38
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2023	41
Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023	45
Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2023	49
Tabel 2.12 Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028	53
Tabel 2.13 Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028	77
Tabel 2.14 Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028	78
Tabel 2.15 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 - 2023.....	81

Tabel 3.1 (T-B.35) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	86
Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026	94
Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan	101
Tabel 6.2 Proyeksi Pendanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.....	107
Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026	108
Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.....	117

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas karunia dan anugerah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Transisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tertentu. Selain itu, Rencana Strategis yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2025 -2026 semoga Tujuan, Sasaran, dan Target kinerja dapat dicapai.

Tarutung, Desember 2024

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198212122006041006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Serta sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Maka untuk memperjelas arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap daerah

diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN).

Selanjutnya guna melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024 bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2024, maka disusunlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Daerah yang penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah merumuskan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2025-2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam Penyusunan Renstra telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dengan berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026. Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara memiliki komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang profesional selaras dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 didasarkan adanya kebijakan nasional dan juga untuk menindaklanjuti RPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia secara strategis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024

Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.”** Kaitan tujuan tersebut diatas dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah pada Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas.

Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan Reformasi Birokrasi terutama Reformasi Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diperlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good government and clean governance*), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan/kompetensi dan kekuatan serta daya saing yang semakin tinggi agar mampu melaksanakan pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik bidang pemerintahan kepada masyarakat.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dan merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Selanjutnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan perubahan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten

- Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona

- Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan Untuk

- Penanganan Pandemic Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dan Penyusunan RPJMD;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 dimaksudkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan Profesionalisme Aparatur, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Strategis

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan bidang kepegawaian yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kepegawaian selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan didalam mengambil kebijakan terkait dengan manajemen kepegawaian tahun 2025-2026 berdasarkan pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah terjadi di masa lalu dan kemungkinan permasalahan

yang akan dihadapi di masa mendatang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025- 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Secara kelembagaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan penjabaran tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara itu, fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, masing-masing sub-bagian atau sub-bidang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu bupati di bidang tugasnya;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja badan;
- c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program badan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum badan;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Badan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan bagian sekretariat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di badan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan badan;
- f. membantu Kepala Badan di bidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, akuntabilitas dan informasi publik;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian sekretariat;

- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- c. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan di badan;
- c. melakukan administrasi keuangan;

- d. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- e. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- d. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- e. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- g. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
- h. memverifikasi database informasi kepegawaian;
- i. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
- j. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
- k. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

4. Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;

- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan mutasi, promosi dan pensiun;
- d. menyelenggarakan proses mutasi, promosi dan pensiun;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi, promosi dan pensiun;
- f. memverifikasi dokumen mutasi, promosi dan pensiun;
- g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi dan pensiun;
- h. mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
- i. memverifikasi dokumen pangkat/golongan dan berkala;
- j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Badan di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi;
- d. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- e. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- f. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- g. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi;
- h. merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
- i. mengkaji dan memproses pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- j. melaporkan LHKPN dan LHKASN ke instansi terkait;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

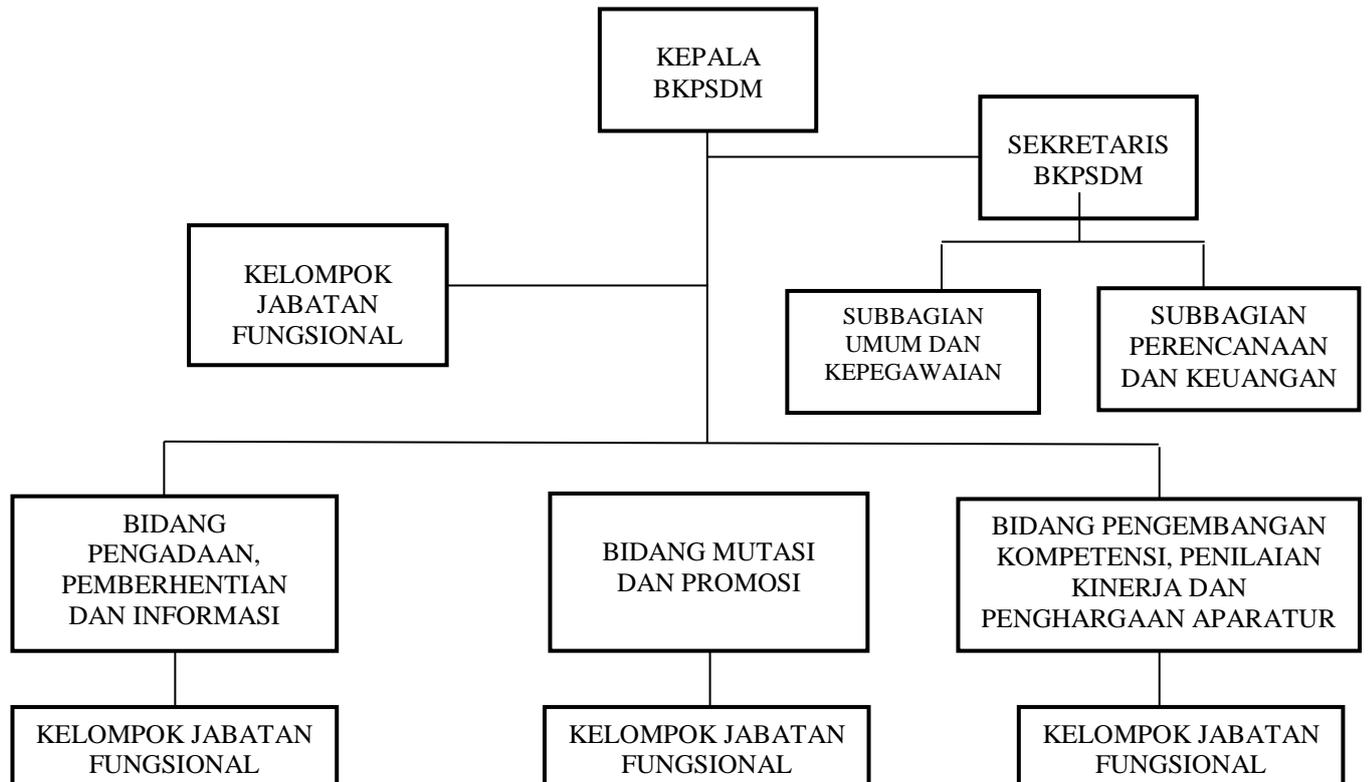
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

7. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

Adapun bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Februari Tahun 2024, jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah 29 (dua puluh sembilan) orang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Gap antara Jumlah Pegawai Yang ada dan Kebutuhan Pengisian Formasi Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Keterangan	Kepala	Sekretariat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Bidang Mutasi dan Promosi	Bidang Pengembangan, Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
Jumlah Pegawai yang Terisi	1	6	9	6	7
Kebutuhan Pegawai	1	8	10	10	10
Plus/Minus	0	-2	-1	-4	-3

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai bahwa jumlah pegawai yang dimiliki BKPSDM adalah 74% dari jumlah kebutuhan pegawai yang ideal. Sehingga diperlukan kiat-kiat agar operasional kegiatan yang ada di dalam organisasi tetap berjalan lancar walaupun kebutuhan pegawai belum terpenuhi secara optimal.

Namun demikian, pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai sehingga cukup mampu dalam mengelola pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara
Menurut Latar Belakang Pendidikan
Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5
2.	S1	15
3.	D III	5
4.	SLTA	4
Jumlah		29

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.3
Pegawai BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara
Menurut Golongan Ruang
Tahun 2024

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	-
2.	II	6
3.	III	17
4.	IV	6
Jumlah		29

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.4
Pegawai BKPSDM Menurut Jenjang Eselon
Tahun 2024

No.	Pejabat	Pejabat Struktural	
		Kebutuhan	Riil
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	2	2
Jumlah		7	7

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

2.2.2 Aset

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara didukung oleh sarana dan prasarana berupa asset/barang inventaris yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor.

Sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, meubilier, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Data Sarana Dan Prasarana Kerja BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

No	Sarana/Prasarana	Kondisi		
		Jumlah	Baik	Rusak
1	Printer	18 bh	18 bh	-
2	Komputer	37 bh	37 bh	-
3	Proyektor + Attachment	3 bh	3 bh	-
4	Layar Proyektor	1 bh	1 bh	-
5	Kamera	2 bh	1 bh	1 bh
6	TV	2 bh	2 bh	-
7	Filing Besi/Metal	5 bh	5 bh	-
8	Rotary Filing	9 bh	9 bh	-
9	Lemari Kaca	3 bh	3 bh	-
10	Lemari Kayu 2 Pintu	2 set	2 set	-
11	Lemari Arsip	2 bh	2 bh	-
12	Lemari Besi/Metal	17 bh	17 bh	-
13	Laptop	8 bh	8 bh	-
14	Server	4 bh	4 bh	-
15	UPS	80 bh	-	80 bh
16	Peralatan Jaringan	5 bh	5 bh	-
17	Hub	5 bh	5 bh	-
18	Scanner	2 bh	2 bh	-
19	Mesin Absensi	2 bh	2 bh	-
20	Mobil Mini Bus	1 bh	1 bh	-
21	Gordyn	34 ptg	34 ptg	-
22	Kursi Putar	8 bh	8 bh	-
23	Kursi Kerja	147 bh	147 bh	-
24	Kursi Rapat	15 bh	15 bh	-
25	Meja Komputer	100 bh	94 bh	6 bh
26	Meja Kerja	35 bh	35 bh	-
27	Meja Kayu/Rotan	1 bh	1 bh	-
28	Meja Rapat	1 bh	1 bh	-
29	Meja Biro	2 bh	2 bh	-
30	Kursi Tamu	3 bh	1 bh	2 bh
31	Sofa	1 Set	1 Set	-
32	Sound System	1 Set	1 Set	-
33	CCTV	2 bh	2 bh	-
34	Alat Penghancur Kertas	1 bh	1 bh	-
35	Alat Kantor Lainnya	5 bh	5 bh	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :

1. Legalisir Dokumen Kepegawaian;
2. Penyusunan Formasi Pegawai;
3. Penerbitan SK Jabatan Pelaksana;
4. Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
5. Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen (Kepegawaian);
6. Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data Baru);
7. Pengajuan Penginputan Data Kepegawaian (Data Pindahan/Mutasi);
8. Pengajuan Perbaikan/Pemutakhiran Data PNS;
9. Kenaikan Pangkat : Pilihan(Fungsional);
10. Kenaikan Pangkat : KPO(Reguler);
11. Kenaikan Pangkat : Penyesuaian Ijazah;
12. Kenaikan Pangkat : Pilihan(Struktural);
13. Mutasi Keluar PNS;
14. Mutasi Masuk PNS;
15. Pencantuman Gelar;
16. Perbaikan dan Penggantian SK Kenaikan Pangkat;
17. Perbaikan dan Penggantian SK Pengangkatan(PNS);
18. Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu;
19. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing;
20. Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan;
21. Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu;
22. Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Tertentu;
23. Pengangkatan Jabatan Fungsional Dari Keterampilan ke Keahlian;
24. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;
25. Penerbitan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar;
26. Pengusulan Tugas Belajar;
27. Penerbitan Surat Izin Seleksi Ijin Belajar;
28. Penerbitan Surat Izin Belajar;

29. Penerbitan Surat Keterangan Belajar;
30. Perbaikan Surat Keputusan/Perintah;
31. Penggantian Surat Keputusan/Perintah Jabatan Fungsional;
32. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) ;
33. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 1;
34. Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat 2;
35. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
36. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
37. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
38. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
39. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis;
40. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional Tertentu;
41. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Diklat di Perangkat Daerah;
42. Verifikasi Pengajuan Tunjangan Kinerja Daerah Pada Bulan Berjalan;
43. Pengajuan Penghargaan Satyalancana Karyasatya;
44. Pengajuan Pembuatan Kartu Pegawai(Karpeg) ;
45. Pengajuan Karis/Karsu;
46. Pengajuan Kartu Peserta Taspen;
47. Penerbitan SK Pensiun Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) ;
48. Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda;
49. Penerbitan SK Pensiun (APS-Diberhentikan Dengan Hormat) ;
50. Penerbitan SK Pensiun Meninggal Dunia Aktif (MDA-Tewas) ;
51. Penerbitan Penerbitan SK Pensiun (APS–Cukup Masa Pensiun) ;
52. (APS-Uzur/ Sakit) ;
53. Penerbitan SK Pemberhentian Dengan Hormat Tanpa Hak Pensiun Sebagai PNS;
54. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
55. Pengajuan SK Petikan Ke 2/3 (SK Pensiun Hilang) ;
56. Pemberian Hukuman Disiplin Sedang/Berat Bagi PNS;
57. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (usulan/permohonan);

58. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (temuan) ;
59. Penerbitan Surat Keputusan Izin Perceraian Bagi PNS;
60. Pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN).

2.3.1 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Pencapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tapanuli Utara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-		Realisasi Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Jumlah ASN				-	-	5.090	4.992	4.739	4.402						
	a. Laki-laki				-	-	1.780	1.737	1.634	1.494						
	b. Perempuan				-	-	3.310	3.255	3.255	2.908						
2.	ASN berdasarkan Jabatan :															
	A. Eselon II				36	36	33	34	34	34		94,28	97,14	94,44	94,44	
	B. Eselon III				170	170	161	161	169	173		96,40	95,83	99,41	100	
	C. Eselon IV				311	311	469	456	234	268		83,45	81,13	75,24	91,96	
3.	Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah				36	36	33	34	34	34		94,28	97,14	94,44	94,44	
4.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah				170	170	161	161	169	173		96,40	95,83	99,41	100	
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah				-	-	2.657	3040	3073	2921						
6.	A. ESELON II															
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM II				-	-	2	1	0	3						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-		Realisasi Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	b.ASN yang belum mengikuti DIKLATPIM II				-	-	31	33	34	31						
7.	B. ESELON III															
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM III				-	-	15	13	5	1						
	b. ASN yang belum Mengikuti DIKLATPIM III				-	-	146	161	161	160						
8.	C. ESELON IV															
	a. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM IV				-	-	46	36	0	5						
	b. ASN yang telah Mengikuti DIKLATPIM IV				-	-	423	410	410	254						
9.	D. ASN yang Mengikuti Diklat															
	a. ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional				-	-	3	250	250	2						
	b. ASN yang Mengikuti Diklat Teknis				-	-	350	364	260	4280						
10.	Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (jam pelatihan)				-	-	14	20	20	20						
11.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				-	-	18	20	13	97						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-		Realisasi Perubahan Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Indeks Profesionalitas ASN				43,08	48,71	36,43	37,29	60,30	43,41		81,04	100	158,68	111,30	
13.	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian				100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
14.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)				14	15	10	10,5	0,96	1,74		100	105	8,72	2,08	
15.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)				100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri atas empat dimensi yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja Dan Disiplin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sasaran prioritas yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari Jumlah ASN, Jumlah ASN berdasarkan jabatan, jumlah jabatan tinggi, jumlah jabatan adminstrasi, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim II, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim III, jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim IV, jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Indikator kinerja program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian, Tingkat Kelengkapan Data dan Informasi Kepegawaian dengan target per tahun sebesar 100%.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan).
3. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar) dengan target per tahun sebesar 100%.

Tabel 2.7
Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	Sekretariat Daerah	108	189	0	4	2	3	3	0	4	1	3	1
2	Sekretariat DPRD	28	42	0	3	0	1	3	0	3	0	1	3
3	Inspektorat	48	71	0	3	1	0	0	0	3	1	0	0
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26	46	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23	63	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
6	Badan Pendapatan Daerah	23	19	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	33	54	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	43	0	1	2	1	1	0	1	2	1	1
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31	49	0	0	2	3	0	0	0	2	3	0
10	Dinas Pariwisata	28	40	0	1	1	2	1	0	1	1	2	1
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	26	28	0	2	3	2	2	0	2	3	2	2
12	Dinas Pertanian	119	308	0	1	6	4	3	0	1	6	4	3
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	22	29	0	3	1	0	1	0	3	1	0	1
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	97	73	0	7	3	1	3	0	7	3	1	3
15	Dinas Perhubungan	36	177	2	3	1	0	2	0	2	1	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	60	0	1	1	2	0	0	0	2	1	1
17	Dinas Ketahanan Pangan	39	135	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23	45	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1
19	Dinas Ketenagakerjaan	23	58	0	3	1	0	0	0	3	1	0	0

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26	55	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	55	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0
22	Dinas Lingkungan Hidup	28	60	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0
23	Dinas Perpustakaan	18	45	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2
24	Dinas Kesehatan	756	2003	0	2	0	1	3	0	2	0	1	3
25	Dinas Sosial	23	37	0	4	0	0	2	0	4	0	0	2
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	29	56	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1297	1691	0	11	1	6	7	0	11	1	6	7
28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49	65	0	3	0	1	2	0	3	0	1	2
29	Satuan Polisi Pamong Praja	28	51	0	2	0	0	1	0	2	0	0	1
30	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	226	425	0	4	3	7	2	0	3	4	8	3
31	Kantor Camat Adiankoting	13	31	0	1	2	1	1	0	1	2	2	0
32	Kantor Camat Garoga	17	31	0	3	2	1	1	0	3	2	1	1
33	Kantor Camat Muara	15	31	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
34	Kantor Camat Pagaran	18	31	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
35	Kantor Camat Pahae Jae	16	31	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
36	Kantor Camat Pahae Julu	23	31	0	2	4	1	0	0	2	4	1	0
37	Kantor Camat Pangaribuan	16	31	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
38	Kantor Camat Parmonangan	12	31	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
39	Kantor Camat Purba Tua	20	31	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
40	Kantor Camat Siatas Barita	20	30	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2
41	Kantor Camat Siborongborong	36	48	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
42	Kantor Camat Simangumban	22	31	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
43	Kantor Camat Sipahutar	16	31	0	3	0	0	1	0	3	0	0	1

NO	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
44	Kantor Camat Sipoholon	24	48	2	1	2	1	1	0	0	2	1	1
45	Kantor Camat Tarutung	63	100	0	7	1	4	4	0	7	1	4	4
Total		3633	6639	5	91	49	60	55	1	87	51	61	52

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Sesuai dengan tabel diatas kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 6639 (enam puluh enam ribu tiga puluh sembilan) orang. Sesuai dengan data Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara per Desember 2023 jumlah ASN yang ada pada saat ini berjumlah 4.402 (empat ribu empat ratus dua) orang.

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	6	10	-	1	-	68	18	103
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	6	-	1	-	25	24	57
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	2	-	16	5	27
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	18	4	29
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	8	-	13	-	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	7	-	14	2	28
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	17	11	36
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	9	-	12	-	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	19	3	28
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	21	6	34
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	13	3	23
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	10	6	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	4	2	-	35	19	61
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	13	6	27
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	13	9	29
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	11	-	15	-	31
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	10	6	23
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	2	-	7	2	16
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	5	1	-	25	78	111
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	1	-	6	6	17
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	7	3	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	5	2	-	60	12	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	7	-	25	17	55
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	3	-	14	3	26
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	2	-	10	9	27
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	1	-	9	7	22

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	4	1	-	31	7	45
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	2	1	-	10	3	18
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	1	1	3	8	-	17	-	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	1	2	6	-	-	71	139	219
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	1	7	-	13
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	3	2	8	-	15
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	6	-	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	4	-	13
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	1	2	8	-	13
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	1	13	-	21
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	4	2	5	-	13
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	2	2	5	-	11
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	-	2	6	-	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	9	-	18
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	16	-	25
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	-	2	6	-	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	11	-	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	7	-	16
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	1	5	2	10	-	19
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	2	-	7
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	3	-	8
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	-	-	5
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	3	1	-	5
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-	1	4	4	-	9
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	1	1	5	-	7
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-	1	1	6	-	8
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-	1	1	3	-	5
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-	1	4	4	-	9

No	PD / UNIT KERJA	ESELON (YANG TERISI)						JFU	JFT	JLH
		II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B			
58	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	-	21	44	595	660
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-	2	1	7	-	10
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	4	34	-	38
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	4	5	2	-	11
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	-	2	2	6	-	10
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	2	4	-	6
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-	1	4	12	-	17
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	1	1	1	1	4
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	2	2	-	-	4
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	2	3	-	5
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-	-	1	8	9
69	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	76	1263	1339
70	SMP	-	-	-	-	-	-	35	646	681
TOTAL		-	34	62	111	162	106	1006	2921	4402

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2023

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	1	-	11	-	-	10	3	60	18	103
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	2	4	34	13	57
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	1	-	19	1	27
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	5	-	15	5	29
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	1	11	6	26
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	7	-	13	6	28
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	4	-	17	11	36
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	16	5	26
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	1	2	13	-	-	-	-	7	5	28
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	1	6	-	-	3	-	20	4	34
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	1	3	-	-	3	-	12	4	23
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	17	2	24
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	23	3	21	11	61
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	1	-	6	-	-	2	-	16	2	27
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	4	3	12	6	29
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	9	-	-	4	-	12	6	31
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	5	1	13	4	23

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	1	-	-	1	-	14	-	16
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	1	37	-	-	7	-	60	6	111
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	-	-	-	-	7	6	17
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	11	5	16
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	30	-	-	9	-	28	14	81
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	8	-	-	6	-	28	13	55
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	1	11	6	26
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	4	-	16	7	27
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	14	6	22
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	4	2	-	13	2	18	6	45
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	-	-	6	7	18
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	12	-	-	1	1	13	3	30
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	1	-	24	1	-	110	3	52	28	219
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	2	4	1	-	-	1	-	5	-	13
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	1	5	1	-	2	-	6	-	15
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	-	1	8	-	15
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	3	-	3	2	13
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	1	1	7	1	13
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	1	10	1	-	4	-	3	2	21

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	2	-	6	-	13
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	2	-	-	3	1	4	1	11
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	5	-	-	1	1	2	1	10
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	7	-	-	2	-	7	2	18
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	9	-	-	4	1	9	2	25
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	3	-	-	2	-	3	2	10
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	3	-	6	1	20
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	8	-	-	1	1	6	-	16
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	6	-	-	2	-	9	2	19
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	3	-	-	2	-	2	-	7
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	1	-	3	-	8
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	-	-	4	1	9
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	2	-	-	-	-	3	-	5
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	1	-	-	-	-	4	-	5
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	2	-	1	1	-	5	-	9
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	4	-	-	-	-	5	-	9
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	4	-	-	1	-	1	1	7
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	1	4	-	-	-	-	3	-	8
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	4	-	-	-	-	1	-	5
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	1	3	-	-	1	-	3	1	9

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
58	UPT. Puskesmas	-	-	20	22	-	328	14	260	16	660
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	2	5	-	-	-	-	3	-	10
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6	4	16	-	-	-	-	12	-	38
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	5	-	-	2	-	4	-	11
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	1	6	-	-	-	1	2	-	10
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	1	-	-	-	-	5	-	6
64	UPT. Dinas Pertanian	-	5	5	-	-	-	-	6	1	17
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	1	1	-	-	1	-	2	-	5
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	3	-	1	-	-	5	-	9
69	Sekolah Dasar	2	5	239	3	31	8	-	1,044	7	1,339
70	SMP	-	1	23	1	5	8	-	627	16	681
TOTAL		14	32	666	31	38	616	43	2685	277	4402

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.10
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	4	-	-	4
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	6	-	-	6
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	73	-	-	73

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	4	-	-	4
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	3	-	-	3
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	5	-	-	5
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	5	-	-	5
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	2	-	168	170
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	1	-	-	1
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	2	-	-	2
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-
58	UPT. Puskesmas	-	-	462	462
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	JABATAN			JUMLAH
		TEKNIS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	-
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
68	Taman Kanak-Kanak	-	22	-	22
69	Sekolah Dasar	-	1087	-	1087
70	SMP	-	360	-	360
TOTAL		118	1469	630	2217

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.11
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2023

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
1	Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
2	Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pendapatan Daerah kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	5	-	6
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
16	Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara	-	-	10	-	-	3	1	59	-	73

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH	
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2		
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
22	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
23	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4
24	Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
28	Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	5
30	DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	-	-	-	-	-	154	-	14	2	-	170
32	Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
41	Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
42	Kecamatan Siborongborong Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
43	Kecamatan Simangumban Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kelurahan Hutatoruan VII Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae Julu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Kelurahan Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Kelurahan Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	-	434	6	22	-	462
59	UPT. Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	PD / UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	
62	UPT. Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	UPT. Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	UPT. Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	UPT. Dinas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	UPT. Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	UPT. Dinas Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Taman Kanak-Kanak	-	-	-	-	-	-	-	22	-	22
69	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	1087	-	1087
70	SMP	-	-	-	-	-	-	-	360	-	360
TOTAL		-	-	10	-	-	610	7	1588	2	2217

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.12
Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
	Diklat Teknis											
1	Bimbingan Teknis Sistem Pelayanan Kepegawaian di BKPSDM	400	500	600	700	800	900	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
2	Bimbingan Teknis Sosialisasi Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi PNS dan CPNS	234	500	600	700	800	900	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
3	Bimbingan Teknis Tata Cara Pemberian Tugas Belajar	186	500	600	700	800	900	4 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
4	Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan BKN No.6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Permerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	388	500	600	700	800	900	8 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
5	Sosialisasi Permenpan RB No.1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	330	500	600	700	800	900	3 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
6	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Pangkat Jenjang Jabatan Fungsional	300	500	600	700	800	900	5 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
7	Sosialisasi PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1595	500	600	700	800	900	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
8	Sosialisasi Aplikasi MY SAPK BKN	1100	500	600	700	800	900	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
9	Bimbingan Teknis Penerapan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah		1	2	3	4	5		Kemendikbud Ristek		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
10	Pelatihan Teknis Pengembangan Pembelajaran Terintegrasi		44	50	60	70	80		BPSDM Provsu		APBD	
11	Bimbingan Teknis Pencegahan Narkoba di lingkungan Kerja		44	50	60	70	80		BNN		APBD	
12	Peningkatan Profesionalisme Guru melalui Merdeka Belajar dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila	295	400	500	600	700	800	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
13	Kompetensi Guru Penggerak Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Yang Ideal	295	400	500	600	700	800	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
14	P5 sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar	261	400	500	600	700	800	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
15	Keterampilan dalam membuka pelajaran dengan menggunakan pembelajaran ber diferensiasi	261	400	500	600	700	800	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
16	Konsep Diri dalam komunikasi interpersonal	117	400	500	600	700	800	2 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
17	Penguatan Transformasi Kesehatan Bagi Bidan dalam pelayanan Kebidanan untuk Indonesia maju	223	400	500	600	700	800	3 JP	BKPSDM Taput	E-learning	APBD	
18	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik		44	50	60	70	80		Kemendikbud Ristek		APBD	
19	Bimbingan Teknis Perencanaan PAUD		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
20	Bimbingan Teknis Pelatihan Teknis Bimbingan Teknis Manajemen Sekolah Dasar		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
21	Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah Dasar		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
22	Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum dan Silabus		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
23	Bimbingan Teknis Pengembangan Teknologi Pembelajaran		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
24	Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Belajar		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
25	Bimbingan Teknis Pengembangan Media Pembelajaran		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
26	Bimbingan Teknis Administrasi Sekolah dasar		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
27	Bimbingan Teknis Manajemen Kepala Sekolah Dasar		15	15	15	15	15		Kemendikbud Ristek		APBD	
28	Bimbingan Teknis Penerapan SPM bidang kesehatan		15	15	15	15	15		Kementerian Kesehatan		APBD	
29	Bimbingan Teknis Tata Kelola Rumah Sakit (RS)		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
30	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
31	Bimbingan Teknis Sistem Remunerasi RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
32	Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan SDM RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
33	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
34	Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
35	Bimbingan Teknis Sistem Rencana Bisnis dan Anggaran RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
36	Bimbingan Teknis Sistem Informasi RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
37	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Material RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
38	Bimbingan Teknis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
39	Bimbingan Teknis Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
40	Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi Remaja		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
41	Bimbingan Teknis Penyehatan Air		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
42	Bimbingan Teknis Higiene, Sanitasi, Makanan dan Minuman		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
43	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
44	Bimbingan Teknis Pengolahan Limbah Cair dan Limbah RS		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
45	Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		15	15	15	15	15		Kementerian Kesehatan		APBD	
46	Bimbingan Teknis Penerapan Puskesmas Menjadi BLUD dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas		15	15	15	15	15		Kementerian Kesehatan		APBD	
47	Bimbingan Teknis Manajemen Puskesmas		21	25	30	35	40		Kementerian Kesehatan		APBD	
48	Bimbingan Teknis Disain dan Implementasi JKN menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk		1	3	5	7	9		Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP)		APBD	
49	Bimbingan Teknis Surveilans Kesehatan		1	3	5	7	9		Kementerian Kesehatan		APBD	
50	Bimbingan Teknis Kesehatan Kerja bagi Petugas Kesehatan		21	25	30	35	40		Kementerian Kesehatan		APBD	
51	Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		2	4	6	8	10		Kementerian Kesehatan		APBD	
52	Bimbingan Teknis Pengawasan Pos Market Bimbingan Teknis Produk Makanan & Minuman Industri Rumah Tangga		2	4	6	8	10		BPOM		APBD	
53	Bimbingan Teknis Penerapan SPM bidang pekerjaan umum		1	3	6	9	12		pusdiklat pemda		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
54	Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
55	Bimbingan Teknis Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
56	Bimbingan Teknis Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
57	Bimbingan Teknis Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
58	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
59	Bimbingan Teknis Analisa Kawasan Rawan dan Bencana		3	6	9	12	15		BPBD Taput		APBD	
60	Bimbingan Teknis Hukum Kontrak dan Konstruksi		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Konstruksi		APBD	
61	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan SPAM		1	3	6	9	12		pusdiklat pemda		APBD	
62	Bimbingan Teknis Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Konstruksi /Pemasok		1	3	6	9	12		Dirjen Bina Konstruksi		APBD	
63	Bimbingan Teknis Penerapan SPM bidang perumahan rakyat		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
64	Bimbingan Teknis Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman		1	3	6	9	12		Mitra Manajemen Daerah DITJEN Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri		APBD	
65	Bimbingan Teknis Penyehatan Lingkungan Perumahan		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
66	Bimbingan Teknis Perumahan dan Permukiman		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
67	Bimbingan Teknis Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan		1	3	6	9	12		Kementerian PUPR		APBD	
68	Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup		APBD	
69	Bimbingan Teknis Penerapan SPM bidang trantibumlinmas		1	3	6	9	12		Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan		APBD	
70	Bimbingan Teknis Dasar Polisi Pamong Praja		4	8	12	16	20		BPSDM Kemendagri		APBD	
71	Bimbingan Teknis Pemadam Kebakaran		3	6	9	12	15		BPSDM Kemendagri		APBD	
72	Bimbingan Teknis Investigator Kebakaran		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
73	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1	2	4	6	8	10	40 JP	BPSDM Kemendagri	Klasikal	APBD	
74	Bimbingan Teknis Penegak Peraturan Daerah		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
75	Bimbingan Teknis Perlindungan Masyarakat		1	3	6	9	12		BPSDM Kemendagri		APBD	
76	Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana		3	6	9	12	15		BPSDM Kemendagri		APBD	
77	Pelatihan Teknis Dasar Manajemen Bencana		4	8	12	16	20		BPBD Taput		APBD	
78	Pelatihan Teknis Mitigasi Bencana		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
79	Pelatihan Teknis TOT Kebencanaan		4	8	12	16	20		BPSDM Kemendagri		APBD	
80	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)	16	20	24	28	32	36	21 JP	BPBD Taput	Klasikal	APBD	
81	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
82	Bimbingan Teknis Penerapan SPM bidang sosial		1	3	6	9	12		BPSDM Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
83	Bimbingan Teknis Perencana Sosial		1	3	6	9	12		BPSDM Kemendagri		APBD	
84	Bimbingan Teknis Dasar Pekerja Sosial (PDPS)		1	3	6	9	12		BPSDM Kemendagri		APBD	
85	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Sosial		1	3	6	9	12		Pusdiklat Kemensos		APBD	
86	Pelatihan Teknis PMKS		2	4	6	8	10		Pusdiklat Kemensos		APBD	
87	Bimbingan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		1	3	6	9	12		Pusdiklat Kemensos		APBD	
88	Bimbingan Teknis Pedoman Pemberian Hibah Bansos		3	6	9	12	15		Pusdiklat Kemensos		APBD	
89	Bimbingan Teknis Asistensi Kesejahteraan Rakyat		3	6	9	12	15		Pusdiklat Kemensos		APBD	
90	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Fakir Miskin Cakupan Daerah		1	3	6	9	12		Pusdiklat Kemensos		APBD	
91	Bimbingan Teknis Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Ketenagakerjaan		2	4	6	8	10		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
92	Bimbingan Teknis Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Tenaga Kerja		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
93	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
94	Bimbingan Teknis Hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
95	Bimbingan Teknis Perencanaan Karir Tenaga Kerja		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
96	Bimbingan Teknis Mediator Hubungan Industrial		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
97	Bimbingan Teknis Perlindungan Tenaga Kerja		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
98	Bimbingan Teknis Penggerak Swadaya Masyarakat		1	3	6	9	12		Kementerian Desa		APBD	
99	Bimbingan Teknis Spesialis Hubungan Industrial		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
100	Bimbingan Teknis Spesialis Bidang Pengawas Ketenagakerjaan		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
101	Bimbingan Teknis PPNS bidang Ketenagakerjaan.		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
102	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah Kabupaten/Kota		1	3	6	9	12		Kementerian Ketenaga Kerjaan		APBD	
103	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		1	3	6	9	12		Kemertrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
104	Bimbingan Teknis Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		2	4	6	8	10		Kemertrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
105	Konvensi Hak Anak (KHA)		5	10	15	20	25		Kemertrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
106	Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender bidang Infrastruktur		5	10	15	20	25		Kemertrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
107	Bimbingan Teknis Sistem Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak		2	4	6	8	10		Kemertrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
108	Bimbingan Teknis Pelayanan Perlindungan Anak		1	3	6	9	12		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
109	Bimbingan Teknis Aksi Afirmasi Perlindungan Anak		1	3	6	9	12		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
110	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Gender.		5	10	15	20	25		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
111	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		2	4	6	8	10		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
112	Bimbingan Teknis Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		1	3	6	9	12		Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		APBD	
113	Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Olahan Pangan		2	4	6	8	10		BPOM		APBD	
114	Bimbingan Teknis Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal		2	4	6	8	10		BPOM		APBD	
115	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan		2	4	6	8	10		BPOM		APBD	
116	Bimbingan Teknis Analisis Ketersediaan Pangan		1	3	6	9	12		BPOM		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
117	Bimbingan Teknis Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian		1	3	6	9	12		BPOM		APBD	
118	Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Makanan Segar		1	3	6	9	12		BPOM		APBD	
119	Bimbingan Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan		1	3	6	9	12		BPOM		APBD	
120	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Pertanahan		1	3	6	9	12		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang		APBD	
121	Dasar-Dasar Pertanahan		1	3	6	9	12		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang		APBD	
122	Pelatihan Teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi Camat		15	30	45	60	75		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang	Klasikal	APBD	
123	Bimbingan Teknis Pengukuran Tanah		15	30	45	60	75		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang		APBD	
124	Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan		15	30	45	60	75		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang		APBD	
125	Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah dalam Kabupaten/Kota		2	4	6	8	10		DITJEN Pengendalian dan Penertipan Tanah dan Tata Ruang		APBD	
126	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Lingkungan Hidup		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
127	Bimbingan Teknis Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
128	Bimbingan Teknis Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Kelembagaan Masyarakat		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
129	Bimbingan Teknis Manajemen dan 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) Sampah		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
130	Bimbingan Teknis Pengelolaan Air dan Limbah Cair		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
131	Bimbingan Teknis Audit, Efisiensi dan Konservasi Air		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
132	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Energi (ISO 50001: 2011)		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
133	Bimtek Penyediaan Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLTL)	2	4	6	8	10	12	20 JP	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Klasikal	APBD	
134	Bimbingan Teknis Audit Lingkungan Utk Sertifikasi Lingkungan		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
135	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
136	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
137	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Domestik (<i>Sewage Treatment Plant</i>)		2	4	6	8	10		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
138	Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Laboratorium (ISO/IEC 17025:2005)		1	3	6	9	12		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		APBD	
139	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil		1	3	6	9	12		Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri		APBD	
140	Bimbingan Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	2	2	20 JP	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Klasikal	APBD	
141	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk		1	3	6	9	12		Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri		APBD	
142	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kependudukan		1	3	6	9	12		Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri		APBD	
143	Bimbingan Teknis Pendataan Potensi Penduduk		1	3	6	9	12		Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri		APBD	
144	Bimbingan Teknis Profil Kependudukan.		1	3	6	9	12		Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri		APBD	
145	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
146	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
147	Bimbingan Teknis Pembangunan Masyarakat Desa		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
148	Bimbingan Teknis Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
149	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
150	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Desa		1	3	6	9	12		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
151	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa		2	4	6	8	10		BPKP		APBD	
152	Bimbingan Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
153	Bimbingan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
154	Bimbingan Teknis Produk Hukum Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
155	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
156	Bimbingan Teknis Pendataan Potensi Penduduk		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
157	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
158	Bimbingan Teknis Pelayanan Minimal Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
159	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
160	Bimbingan Teknis Partisipatif Pembangunan Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
161	Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDES		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
162	Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran bagi Sekretaris Desa		15	30	45	60	75		Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri		APBD	
163	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Pengendalian Penduduk dan KB		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
164	Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
165	Bimbingan Teknis Fasilitasi Keberlangsungan Ber-KB		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
166	Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
167	Bimbingan Teknis Pengendalian Penduduk		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
168	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
169	Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan KB		1	3	6	9	12		BKKBN		APBD	
170	Diklat Pembentukan PPNS Perhubungan Darat Poltrada Bali Kementerian Perhubungan RI	1	3	5	7	9	12	20 JP	Politeknik Transportasi Darat Bali	Klasikal	APBD	
171	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Perhubungan		1	3	6	9	12		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
172	Pelatihan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas		1	3	6	9	12		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
173	Bimbingan Teknis Penguji Kendaraan Bermotor		5	10	15	20	25		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
174	Bimbingan Teknis Pengelola Terminal Bus		3	6	9	12	15		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
175	Bimbingan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		1	3	6	9	12		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
176	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN)		3	3	3	3	3		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
177	Bimbingan Teknis Manajemen Rekayasa Lalulintas		3	3	3	3	3		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
178	Bimbingan Teknis Pengatur Lalulintas		5	5	5	5	5		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
179	Bimbingan Teknis Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota		1	3	6	9	12		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
180	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Usaha Angkutan Laut, Sungai dan Danau serta Pelayaran Rakyat		2	4	6	8	10		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
181	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		1	3	6	9	12		Kementerian Perhubungan/ Dinas Perhubungan/Kepolisian		APBD	
182	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Komunikasi Dan Informasi		1	3	6	9	12		Kementerian Komunikasi dan Informatika		APBD	
183	Bimbingan Teknis Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah		1	3	6	9	12		Kementerian Komunikasi dan Informatika		APBD	
184	Bimbingan Teknis Pengelolaan <i>e-Government</i> Daerah Kabupaten/Kota		1	3	6	9	12		Kementerian Komunikasi dan Informatika		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
185	Bimbingan Teknis Jaringan Komputer dan Sistem Layanan Administrasi		2	4	6	8	10		Kementerian Komunikasi dan Informatika		APBD	
186	Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Tata Kelola WEB dan Jaringan Komputer		2	4	6	8	10		Kementerian Komunikasi dan Informatika		APBD	
187	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
188	Bimbingan Teknis Perkoperasian;		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
189	Bimbingan Teknis Kewirausahaan;		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
190	Bimbingan Teknis Keterampilan teknis KUMKM;		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
191	Bimbingan Teknis Pengelola Koperasi Jasa Keuangan		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
192	Bimbingan Teknis Pengembangan Lembaga UMKM		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
193	Pelatihan Teknis Kewirausahaan Manajemen UMKM dalam pendistribusian dan pemasaran produk		2	4	6	8	10		Kemenkop UKM		APBD	
194	Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Advokasi KUMKM		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
195	Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Informasi KUMKM		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
196	Bimbingan Teknis Penumbuhan Budaya Usaha pada Kalangan Masyarakat Miskin		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
197	Bimbingan Teknis Pemasyarakatan Kewirausahaan		2	4	6	8	10		Kemenkop UKM		APBD	
198	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Sosial		2	4	6	8	10		Kemenkop UKM		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
199	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pembinaan Komperasi Simpan Pinjam		2	4	6	8	10		Kemenkop UKM		APBD	
200	Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.		1	3	6	9	12		Kementerian Investasi/BKPM		APBD	
201	Bimbingan Teknis Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1	3	6	9	12		Kementerian Investasi/BKPM		APBD	
202	Bimbingan Teknis Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal		2	4	6	8	10		Kementerian Investasi/BKPM		APBD	
203	Bimbingan Teknis Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal		2	4	6	8	10		Kementerian Investasi/BKPM		APBD	
204	Bimbingan Teknis Pengelolaan Penanaman Modal		2	4	6	8	10		Kementerian Investasi/BKPM		APBD	
205	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK bidang Kepemudaan dan Olahraga		1	3	6	9	12		Kementerian Pemuda dan Olahraga		APBD	
206	Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan		1	3	6	9	12		Kementerian Pemuda dan Olahraga		APBD	
207	Bimbingan Teknis Manajemen Perpustakaan.		1	3	6	9	12		Biro SDM dan Umum Perpustakaan Nasional Indonesia		APBD	
208	Bimbingan Teknis Pelayanan Pemakai (Berbasis Komputer).		1	3	6	9	12		Biro SDM dan Umum Perpustakaan Nasional Indonesia		APBD	
209	Bimbingan Teknis Otomasi Perpustakaan (Program Slims).		1	3	6	9	12		Biro SDM dan Umum Perpustakaan Nasional Indonesia		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
210	Bimbingan Teknis Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Kearsipan		1	3	6	9	12		Biro SDM dan Umum Perpustakaan Nasional Indonesia		APBD	
211	Pelatihan Teknis Manajemen Kearsipan		1	3	6	9	12		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	E-learning	APBD	
212	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis		2	4	6	8	10		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
213	Bimbingan Teknis Penyusunan Instrumen Pengelolaan Arsip		2	4	6	8	10		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
214	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Aktif		45	100	150	200	250		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
215	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Inaktif		45	100	150	200	250		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
216	Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip		45	100	150	200	250		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
217	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Berbasis TIK		45	100	150	200	250		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
218	Bimbingan Teknis Kearsipan Pengelola Arsip		45	100	150	200	250		Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)		APBD	
219	Bimbingan Teknis Pengelolaan Kesenian Daerah		1	3	6	9	12		Kementerian Pendidikan dan kebudayaan		APBD	
220	Bimbingan Teknis Pengelolaan Cagar Budaya Daerah		2	4	6	8	10		Kementerian Pendidikan dan kebudayaan		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
221	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudayaan Ikan		1	3	6	9	12		Kementerian kelautan dan Perikanan		APBD	
222	Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kualitas Air,		1	3	6	9	12		Kementerian kelautan dan Perikanan		APBD	
223	Bimbingan Teknis Panen dan Pasca Panen,		1	3	6	9	12		Kementerian kelautan dan Perikanan		APBD	
224	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK Bidang Pariwisata		1	3	6	9	12		Kemenparekraf		APBD	
225	Bimbingan Teknis Pengelolaan daya tarik wisata		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	
226	Bimbingan Teknis Pengelolaan kawasan strategis pariwisata		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	
227	Bimbingan Teknis Pengelolaan destinasi pariwisata		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	
228	Bimbingan Teknis Perencanaan Pariwisata Daerah		1	3	6	9	12		Kemenparekraf		APBD	
229	Bimbingan Teknis Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	
230	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK Bidang Pertanian		1	3	6	9	12		Kementerian Pertanian		APBD	
231	Bimbingan Teknis Pemetaan Mendukung Kegiatan RPLP2B	1	2	4	6	8	10	20 JP	Kementerian Pertanian	Tatap Muka	APBD	
232	Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pembinaan bidang Pertanian		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	
233	Bimbingan Teknis Teknis Irigasi		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	
234	Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
235	Bimbingan Teknis Teknologi Pertanian		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	
236	Bimbingan Teknis Komoditi Pertanian		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
237	Bimbingan Teknis Budidaya Pertanian		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	
238	Bimbingan Teknis Agrobisnis		2	4	6	8	10		Kementerian Pertanian		APBD	
239	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP)		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
240	Bimbingan Teknis Pengawas Benih Tanaman (PBT)		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
241	Bimbingan Teknis Teknis Padi bagi Penyuluh Pertanian		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
242	Bimbingan Teknis Teknis Jagung bagi Penyuluh Pertanian		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
243	Bimbingan Teknis Teknis Kedelai bagi Penyuluh Pertanian		15	30	45	60	75		Kementerian Pertanian		APBD	
244	Bimbingan Teknis Penerapan NSPK Bidang Perdagangan		1	3	6	9	12		Kementerian Perdagangan		APBD	
245	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan		2	4	6	8	10		Kementerian Perdagangan		APBD	
246	Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur Penerbitan Ijin bidang Perdagangan		2	4	6	8	10		Kementerian Perdagangan		APBD	
247	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sarana Industri Perdagangan		2	4	6	8	10		Kementerian Perdagangan		APBD	
248	Penerapan NSPK Bidang Perindustrian		1	3	6	9	12		Kementerian Perindustrian		APBD	
249	Bimbingan Teknis Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	1	2	4	6	8	10	20 JP	Kementerian Perindustrian	Klasikal	APBD	
250	Bimbingan Teknis Desain dan Produksi Batik		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	
251	Bimbingan Teknis Strategi Penetapan Harga		2	4	6	8	10		Kemenparekraf		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
252	Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan UMKM		1	3	6	9	12		Kemenkop UKM		APBD	
253	Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar		3	6	9	12	15		Kemenkop UKM		APBD	
254	Penyusunan RPJMD		2	4	6	8	10		BAPPENAS		APBD	
255	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah		2	4	6	8	10		BAPPENAS		APBD	
256	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		2	4	6	8	10		BAPPENAS		APBD	
257	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah		45	100	150	200	250		BAPPENAS		APBD	
258	Bimbingan Teknis Reviu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja		45	100	150	200	250		BAPPENAS		APBD	
259	Bimbingan Teknis Penganggaran Daerah		15	30	45	60	75		BAPPENAS		APBD	
260	Bimbingan Teknis Perbendaharaan Keuangan Daerah		4	4	4	4	4		BPSDM Kemendagri		APBD	
261	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
262	Pelatihan Teknis Manajemen Keuangan		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
263	Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
264	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah		2	4	6	8	10		BPSDM Kemendagri		APBD	
265	Diklat PBJ	20	30	30	30	30	30	48 JP	LKPP	Blended Learning	APBD	
266	Bimbingan Teknis Pajak dan Retribusi Daerah		15	30	45	60	75		BPSDM Kemendagri		APBD	
267	Bimbingan Teknis Penilaian Aset		45	100	150	200	250		BPSDM Kemendagri		APBD	
268	Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian ASN		5	5	5	5	5		BKN / BPSDM		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
269	Disiplin PNS	3	2	2	2	2	2	40 JP	BKN / BPSDM	Tatap Muka	APBD	
270	Pelatihan Teknis Human Capital Development Plan		2	4	6	8	10		BKN / BPSDM		APBD	
271	Bimbingan Teknis Komunikasi Efektif		2	4	6	8	10		BKN / BPSDM		APBD	
272	Bimbingan Teknis Persiapan Pensiun (Purna Bhakti) PNS		1	3	6	9	12		BKN / BPSDM		APBD	
273	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ASN		2	4	6	8	10		BKN / BPSDM		APBD	
274	Bimbingan Teknis Perencanaan Pegawai ASN								BKN / BPSDM		APBD	
275	Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai		2	4	6	8	10		BKN / BPSDM	E-learning	APBD	
276	Pelatihan Teknis Analisa Jabatan ASN		4	4	4	4	4		BKN / BPSDM	E-learning	APBD	
277	Pelatihan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		45	100	150	200	250		BKN / BPSDM	E-learning	APBD	
278	Pelatihan Teknis Analisis Kesenjangan Kompetensi		5	5	5	5	5		BKN / BPSDM	E-learning	APBD	
279	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	10	15	20	25	10	50 JP	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri	Tatap Muka	APBD	
280	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara		2	4	6	8	10		Kemenkumham		APBD	
281	Bimbingan Teknis Sistem Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum		5	10	15	20	25		Kemenpan RB		APBD	
282	Bimbingan Teknis Advokasi Hukum		5	10	15	20	25		Kemenkumham		APBD	
283	Bimbingan Teknis Pengembangan Organisasi		2	4	6	8	10		Kemenpan RB		APBD	
284	Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan		1	3	6	9	12		Kemenpan RB		APBD	
285	Bimbingan Teknis Manajemen Perkantoran Modern		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
286	Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Organisasi		5	10	15	20	25		Kemenpan RB		APBD	
287	Bimbingan Teknis Telaahan Staf dan Paripurna		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	
288	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP		45	100	150	200	250		Kemenpan RB		APBD	
289	Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas/ Elektronik		45	100	150	200	250		Kemendagri		APBD	
290	Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	
291	Pelatihan Teknis Administrasi Dasar		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	
292	Bimbingan Teknis Administrasi Perlengkapan Kantor		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	
293	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pemerintah		45	100	150	200	250		LKPP		APBD	
294	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		45	100	150	200	250		BPSDM Kemendagri		APBD	
295	Bimbingan Teknis Penataan Ruang Perkantoran		5	10	15	20	25		BPSDM Kemendagri		APBD	
296	Bimbingan Teknis Penataan Lingkungan Perkantoran		5	10	15	20	25		BPSDM Kemendagri		APBD	
297	Bimbingan Teknis Keprotokolan		2	4	6	8	10		Lemhanas		APBD	
298	Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan		2	4	6	8	10		Kemendagri		APBD	
299	Bimbingan Teknis Ketahanan Nasional								Lemhanas			
300	Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Sosial		15	30	45	60	75		Lemhanas		APBD	
301	Bimbingan Teknis Implemetasi SIPD RI		45	100	150	200	250		Kemendagri		APBD	
302	Bimbingan Teknis Kepamongprajaan	3	5	10	15	20	25	45 JP	BPSDM Kemendagri	Tatap Muka	APBD	
303	Diklat Penggunaan Router Mikrotik dan perangkat kerasnya	2	4	6	8	10	12	40 JP	Kominfo	Tatap Muka	APBD	
304	Bimbingan Teknis Sakip dan Lakip		15	30	45	60	75		BPSDM Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
305	Diklat Penyusunan LPPD		3	6	9	12	15		BPSDM Kemendagri		APBD	
306	Diklat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)		5	10	15	20	25		Kementerian Lingkungan Hidup		APBD	
Total		6042	8242	11314	14435	17556	20658					

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.13
Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
	Manajerial											
1	Pembekalan KDH		5	10	15	20	25		Kemendagri		APBD	
2	Latsar	40	5	10	15	20	25	647 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat I		5	10	15	20	25		LAN RI		APBD	
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	3	5	10	15	20	25	647 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
5	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	3	5	10	15	20	25	647 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
6	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	10	5	10	15	20	25	647 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
7	PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator)	1	5	10	15	20	25	905 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
8	PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas)	6	5	10	15	20	25	905 JP	LAN RI	Klasikal	APBD	
9	PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional)		5	10	15	20	25		LAN RI		APBD	
10	Diklat PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)	20	5	10	15	20	25	45 JP	BPSDM Kemendagri	Klasikal	APBD	
11	Diklat Manajerial Kepala Sekolah Dasar		5	10	15	20	25		BPSDM Kemendagri		APBD	
12	Diklat Kepemimpinan bagi Kepala Puskesmas		21	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri	Klasikal	APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
13	Peningkatan Kepemimpinan Camat dan Lurah		11	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri	Klasikal	APBD	
14	Kepemimpinan Kesehatan bagi Kepala Puskesmas		21	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
15	Literasi Digital Sektor Pemerintah	29	30	15	15	15	15	45 JP	BPSDM Kemendagri	Tatap Muka dan Virtual	APBD	
16	Pelatihan Digital Leaderscity Academy (DLA)	1	5	10	15	20	25	45 JP	BPSDM Kemendagri	Tatap Muka	APBD	
Total		113	143	150	210	270	330					

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel 2.14
Proyeksi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Fungsional ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 s/d 2028

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
	Fungsional											
1	Diklat Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
2	Diklat Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja (POL-PP)	2	5	5	5	5	5	100 JP	BPSDM Kemendagri		APBD	
3	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja Bagi PNS yang diangkat dalam Formasi Jabatan Fungsional Kategori Keahlian dan Keterampilan		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
4	Diklat Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
5	Diklat Jabatan fungsional Analis Kebakaran		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	

NO	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (Tahun)						Jumlah JP	Penyelenggara	Sistem Pembelajaran	Sumber Dana	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				APBD	APBN
6	Diklat Jabatan fungsional Analis Standardisasi		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
7	Diklat Jabatan Fungsional Operator SIAK		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
8	Diklat Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB)		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
9	Diklat Jabatan Fungsional Auditor		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
10	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan		1	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
11	Pelatihan Calon Analisis Kebijakan		2	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
12	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup		2	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
13	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional PPBJ		2	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
14	Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintahan Bagi PPPK		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
15	Pelatihan Penyusunan Angka Kredi Bagi Tenaga Pendidikan		1	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
16	Pelatihan Perencanaan Penyuluhan dan Pendampingan KTH		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
17	Pengembangan Kompetensi Kepala SLB Berbasis Aset (PKBA)		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
18	Pelatihan Penanganan Penderita Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON) Bagi Tim Emergency		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri			
19	Pelatihan Pembentukan P2UPD		5	5	5	5	5		BPSDM Kemendagri		APBD	
Total		2	78	95	95	95	95					

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Perangkat Daerah

Anggaran Pendanaan Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara telah direalisasikan melalui berbagai program kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan jumlah belanja namun dari segi persentase capaian relatif turun, permasalahan yang sering timbul di dalam pelaksanaan anggaran adalah adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan penyerapan anggaran dikarenakan adanya kegiatan yang sangat tergantung dengan jadwal yang ditetapkan oleh berbagai Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti Pengadaan ASN, Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Penyelenggaraan Diklat Teknis serta Kegiatan Bidang Kepegawaian dan Diklat lainnya. Alokasi target dan realisasi belanja telah disajikan dalam Tabel 2.15 (T-C.24) sebagai berikut :

Tabel 2.15 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019 - 2023

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	584,953,800	537,382,900	-	-	-	487,807,420	504,036,751	-	-	-	83.39	93.79	-	-	-	351,391,980	307,634,386
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109,080,700	62,728,599	-	-	-	37,127,300	59,940,500	-	-	-	34.04	95.56	-	-	-	52,327,660	35,441,770
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134,580,000	300,180,000	-	-	-	132,336,122	77,014,000	-	-	-	98.33	25.66	-	-	-	106,952,000	61,224,404
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	21,475,200	14,106,900	-	-	-	18,490,400	11,731,000	-	-	-	86.10	83.16	-	-	-	9,816,420	8,327,740
5	Program Pengembangan Aparatur	-	474,788,800	-	-	-	-	418,410,499	-	-	-	-	88.13	-	-	-	94,957,760	83,682,100
6	Program Pendayagunaan Aparatur	-	468,486,400	-	-	-	-	309,161,508	-	-	-	-	65.99	-	-	-	93,697,280	61,832,302
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,210,582,800	-	-	-	-	1,154,039,360	-	-	-	-	95.33	-	-	-	-	694,259,826	613,682,867
9	Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur	-	600,793,900	-	-	-	-	405,409,435	-	-	-	-	67.48	-	-	-	120,158,780	81,081,887

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3,541,673,850	3,649,986,248	2,802,017,938	-	-	3,251,484,002	3,337,978,175	2,776,108,033	-	-	91.81	91.45	99.08	1,998,735,607	1,873,114,042
11	Program Kepegawaian Daerah	-	-	934,816,800	1,404,879,764	1,696,188,300	-	-	711,866,844	1,292,470,484	1,652,125,521	-	-	76.15	92.00	97.40	467,939,313	731,292,570
12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	906,043,400	1,410,308,800	611,902,000	-	-	898,815,000	1,404,906,800	610,001,716	-	-	99.20	99.62	99.69	585,650,840	582,744,703

Selanjutnya pada Tabel 2.15 (T-C.24) diatas dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk belanja langsung cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2020 dimana ditahun ini terjadi refocusing anggaran besar-besaran sehingga mempengaruhi struktur anggaran pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan diklat. Sementara itu, kebutuhan untuk seperti kegiatan Pengadaan ASN, Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Penyelenggaraan Diklat Teknis, memang membutuhkan alokasi anggaran yang relatif besar. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikatakan cukup baik secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2018-2023 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan kedepan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

- a. Peningkatan Integritas dan Profesionalitas ASN. Upaya peningkatan Integritas dan Profesionalitas ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tantangan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan publik agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan;
- b. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Perlunya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian agar data kepegawaian dapat tersusun dan terkelola secara rinci meliputi biodata, riwayat pendidikan, data kepangkatan dan riwayat diklat agar dapat diakses secara online;
- c. Perubahan dan perkembangan peraturan perundangan bidang kepegawaian yang harus disikapi secara cepat dan tepat.

Di samping beberapa tantangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan kedepan, yakni:

- a. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil dengan melaksanakan ataupun mengirimkan PNS untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan seperti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Bimbingan Teknis dan kegiatan pengembangan sumber daya aparatur lainnya;
- b. Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan profesional;
- c. Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Manajemen Sumber Daya Aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Terjalinnnya kerjasama yang baik antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan Instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Pemanfaatan sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan prima dan tepat.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tapanuli Utara**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Fungsi organisasi tersebut sekaligus merupakan bagian dari perwujudan road map Reformasi Birokrasi yang telah dijadikan salah satu tujuan tiap tahapan dalam RPJMN. Sasaran Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia aparatur telah dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, perbaikan sistem rekrutmen pegawai, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, peningkatan sistem aplikasi manajemen kepegawaian, pengukuran kompetensi pegawai dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serta perlindungan. Keseluruhan aspek layanan manajemen ASN tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya manajemen ASN	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah • Belum tersedianya data pegawai secara real time dan lengkap • Belum optimalnya ketersediaan perencanaan kebutuhan ASN jangka menengah selama 5 tahun
		Belum adanya kesesuaian antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyusunan ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan • Belum optimalnya penempatan ASN yang sesuai jabatan yang dilamar
		Belum optimalnya promosi, mutasi dan rotasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kebijakan terkait pola karier • Belum terlaksananya mutasi, rotasi dan promosi ke Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif
		Belum optimalnya sistem pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembangunan sistem informasi kepegawaian berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum optimalnya pembinaan ASN	Belum optimalnya manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakannya penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kerja • Belum optimalnya penerapan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur • Belum dilakukan analisis permasalahan kinerja dan strategi
		Belum optimalnya pembinaan karir dan peningkatan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum disusunnya profil pegawai berdasarkan kompetensi • Belum disusunnya standar kompetensi untuk setiap jabatan • Belum adanya strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kinerja dengan peningkatan kapasitas ASN • Belum optimalnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengatasi kesenjangan kompetensi ASN • Belum adanya peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring.

Identifikasi permasalahan tersebut di atas digunakan untuk menentukan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, masing-masing kriteria masalah juga menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan, sehingga tercipta sinergitas antara masalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program hingga kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Daerah

Menelaah tujuan, sasaran, dan program daerah dan ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut.

Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Pada Tahun 2025-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, mempunyai Tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesionalitas dan Berintegritas” dan Sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)”

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020 – 2024

Dalam RPJMN IV 2020 – 2024, Buku I, dijabarkan 7 agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

VISI : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

MISI :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengacu pada pedoman penyusunan Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Didalam Renstra Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : ”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

MISI :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

3.3.4 Telaahan Renstra Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Didalam Renstra Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

MISI :

1. Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional;
2. Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten;
3. Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi;

4. Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Sasaran dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government;
2. Terwujudnya organisasi pembelajar LAN yang berkinerja tinggi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada hubungan yang cukup signifikan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan adalah :

1. Optimalisasi penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya perjanjian kerja;
2. Optimalisasi promosi, mutasi dan rotasi sumber daya manusia aparatur;
3. Peningkatan kompetensi manajerial sumber daya manusia aparatur;
4. Optimalisasi kinerja dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur;
5. Penempatan aparatur sipil negara secara lebih optimal sesuai kompetensi, analisa beban kerja dan analisa jabatan;
6. Digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan akurasi data pegawai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang akan hendak dicapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan perangkat daerah yang ditetapkan agar dapat mengetahui hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan dua tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas.

4.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN;
2. Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Target Kinerja		Penanggung jawab
						2022		2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	38,00	60,30	43,08	48,71	BKPSDM
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi		9,50	20,99	10,00	15,00	
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		15,20	9,31	18,00	17,00	
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja		11,40	25,00	13,00	14,00	
				Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin		1,90	5,00	2,08	2,71	
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	70,00	68,00	73,00	75,00	

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas dan produktivitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga profesionalisme dan integritas merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk menciptakan ASN yang Profesional dan Berintegritas dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 adalah Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektifitas dan produktivitas dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga profesionalisme dan integritas merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

Pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yaitu Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

1. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3. Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

4. Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Adapun indikator dari setiap dimensi Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi

Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
- f. Di bawah SLTA.

2. Kompetensi

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

3. Kinerja

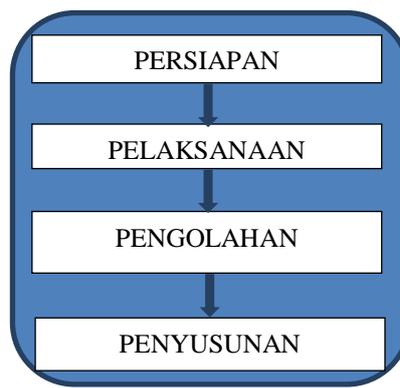
Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
4. Disiplin

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan
- c. Hukuman disiplin berat.

Tahap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:



- 1. Persiapan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- 2. Pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- 3. Pengolahan data Indeks Profesionalitas ASN; dan
- 4. Penyusunan laporan Indeks Profesionalitas ASN.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidas meliputi:

- a. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- b. Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS);
- c. Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan
- d. Data Hukuman Disiplin Pegawai.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

4.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026.

Strategi yang ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Meningkatkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia aparatur;
2. Meningkatkan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur;
3. Meningkatkan pembinaan karir dan kompetensi;
4. Optimalisasi promosi dan mutasi sumber daya manusia aparatur;
5. Optimalisasi sistem pendukung kepegawaian.

4.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:

1. Ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun);
2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan real time;
3. Ketersediaan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka menengah (5 tahun);
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;
5. Mengoptimalkan penempatan ASN yang sesuai jabatan yang dilamar;
6. Adanya kebijakan internal tentang pola karir;
7. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
8. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
9. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
10. Adanya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai di luar jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
12. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur;
13. Adanya analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya;
14. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan kompetensi;
15. Menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan;
16. Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
17. Memfasilitasi Diklat dalam rangka mengatasi kesenjangan;
18. Meningkatkan kompetensi melalui coaching, conseling dan mentoring;
19. Peningkatan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi;

20. Optimalisasi pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
21. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi dan berkinerja baik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 :					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih					
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya Kualitas Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan perencanaan kebutuhan ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun) 2. Ketersediaan data kepegawaian secara real time dan lengkap 3. Ketersediaan rencana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan ASN untuk jangka menengah (5 tahun) 4. Mengoptimalkan penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan 5. Mengoptimalkan penempatan ASN yang sesuai jabatan yang dilamar
				Meningkatkan manajemen kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja 2. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 3. Optimalisasi penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan Sistem

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
					Kepegawaian Kabupaten Tapanuli Utara 5. Adanya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan pegawai di luar jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan program pensiun
				Meningkatkan Pembinaan karir dan kompetensi	1. Adanya kebijakan internal tentang pola karir 2. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif; 3. Menyusun profil pegawai yang disusun berdasarkan kompetensi 4. Menyusun standar kompetensi untuk setiap jabatan 5. Menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kinerja dengan peningkatan kapasitas ASN 6. Meningkatkan kompetensi melalui coaching, conseling dan mentoring
				Optimalisasi sistem pendukung kepegawaian	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 :**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai hasil evaluasi AKIP	Peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan laporan kinerja
				Peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan pengawasan internal
				Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran	Meningkatkan kapasitas aparatur yang memahami tentang prosedur pengelolaan keuangan yang baik
				Penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan peruntukan penggunaan anggaran	Optimalisasi pelaksanaan kajian oleh aparatur mengenai rencana untuk pengelolaan anggaran

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Mebel
 - d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Mebel

- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - d) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - e) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - f) Pengelolaan Data Kepegawaian
 2. Mutasi dan Promosi ASN
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 3. Pengembangan Kompetensi ASN
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - d) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
 - e) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif terlampir sebagai berikut :

Tabel 6.2
Proyeksi Pendanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026

No.	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	2025		2026	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
KEPEGAWAIAN						
1.	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Penunjang yang Tertangani	100%	Rp. 3.844.000.000	100%	Rp. 4.015.000.000
	- Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	71,10%	Rp. 2.920.000.000	72,00	Rp. 3.148.000.000
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	14,39%		15,00	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	37,75%		38,00	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
2.	- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	14%	Rp. 1.300.000.000	15%	Rp. 1.400.000.000
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	100%		100%	

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %	3,844,000,000	100 %	4,015,000,000	100 %	4,015,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	22,000,000	3 Laporan	24,000,000	3 Laporan	24,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6,000,000	6 Dokumen	6,000,000	6 Dokumen	6,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	6,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	12,000,000	2 Laporan	12,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	2,667,000,000	4 Laporan	2,818,500,000	4 Laporan	2,818,500,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2,600,000,000	32 Orang/bulan	2,750,000,000	32 Orang/bulan	2,750,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	56,000,000	15 Dokumen	56,000,000	15 Dokumen	56,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	7,000,000	1 Laporan	7,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,500,000	12 Laporan	5,500,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	3 Laporan	4,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan	2 Laporan	130,000,000	2 Laporan	130,000,000	2 Laporan	130,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	31 Paket	30,000,000	31 Paket	30,000,000	31 Paket	30,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	300 Orang	100,000,000	300 Orang	100,000,000	300 Orang	100,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	434,000,000	7 Laporan	461,500,000	7 Laporan	461,500,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp
							target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7,000,000	2 Paket	7,500,000	2 Paket	7,500,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60,000,000	4 Paket	65,000,000	4 Paket	65,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15,000,000	2 Paket	10,000,000	2 Paket	10,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30,000,000	2 Paket	35,000,000	2 Paket	35,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	16,000,000	3 Dokumen	17,000,000	3 Dokumen	17,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	7,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	75 Laporan	300,000,000	75 Laporan	320,000,000	70 Laporan	320,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	335,000,000	4 Laporan	305,000,000	4 Laporan	305,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000	1 Unit	35,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	130,000,000	8 Unit	150,000,000	8 Unit	150,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	9 Unit	170,000,000	15 Unit	120,000,000	15 Unit	120,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	3 Laporan	82,000,000	3 Laporan	82,000,000	3 Laporan	82,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	1,000,000	10 Laporan	1,000,000	10 Laporan	1,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	25,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56,000,000	12 Laporan	56,000,000	12 Laporan	56,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	170,000,000	4 Laporan	190,000,000	4 Laporan	190,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2 Unit	60,000,000	2 Unit	65,000,000	2 Unit	65,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	30,000,000	7 Unit	35,000,000	7 Unit	35,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20 Unit	40,000,000	20 Unit	40,000,000	20 Unit	40,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	71,10 %	71,10 %	2,920,000,000	72,00 %	3,148,000,000	72,00 %	3,148,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
				Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	14,39 %	14,39 %		15,00 %		15,00 %			
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persentase Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	37,75 %	37,75 %		38,00 %		38,00 %			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Laporan	6 Laporan	730,000,000	6 Laporan	750,000,000	6 Laporan	750,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	45,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	313 Dokumen	313 Dokumen	50,000,000	313 Dokumen	50,000,000	320 Dokumen	50,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp
							target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	40,000,000	1 Lembaga	50,000,000	1 Lembaga	50,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2500 Dokumen	2000 Dokumen	50,000,000	2500 Dokumen	55,000,000	2500 Dokumen	55,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	55,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	3 Laporan	120,000,000	3 Laporan	160,000,000	3 Laporan	160,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	90 Dokumen	90 Dokumen	30,000,000	95 Dokumen	50,000,000	95 Dokumen	50,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	900 Dokumen	900 Dokumen	60,000,000	900 Dokumen	75,000,000	900 Dokumen	75,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	18 Dokumen	18 Dokumen	30,000,000	18 Dokumen	35,000,000	18 Dokumen	35,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	3 Laporan	3 Laporan	1,900,000,000	3 Laporan	2,105,000,000	3 Laporan	2,105,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	70 Orang	1,300,000,000	75 Orang	1,500,000,000	50 Orang	1,500,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	4 Orang	4 Orang	150,000,000	4 Orang	150,000,000	4 Orang	150,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp
							target	Rp	target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 Orang	15 Orang	450,000,000	16 Orang	455,000,000	16 Orang	455,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	170,000,000	5 Laporan	133,000,000	5 Laporan	133,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	15 Orang	15 Orang	30,000,000	20 Orang	35,000,000	20 Orang	35,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	1 Orang	20,000,000	1 Orang	23,000,000	1 Orang	23,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	55,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
		5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
Meningkatkan Kualitas ASN yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Pelatihan Kepemimpinan)	1,74 %	14 %	1,300,000,000	15 %	1,400,000,000	15 %	1,400,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara		
				ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Dasar)	13 %	100 %		100 %		100 %					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah		Unit Kinerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 laporan	2 laporan	1,300,000,000	2 laporan	1,400,000,000	2 laporan	1,400,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	2 Laporan	1,300,000,000	2 Laporan	1,400,000,000	2 Laporan	1,400,000,000	BKPSDM Kab. Tapanuli Utara	Kabupaten Tapanuli Utara
Total								8,064,000,000		8,563,000,000		8,563,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam 2 (dua) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Target indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja serta menjadi pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara selama 2 (dua) Tahun. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Kabupaten Tapanuli Utara (2026)
			2023	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. KEPEGAWAIAN						
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	71,09	71,10	72,00	72,00
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	14,39	14,39	15,00	15,00
3.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	37,75	37,75	38,00	38,00
4.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	43,08	48,71	48,71
B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (pelatihan kepemimpinan)	Persen	1,74	14	15	15
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (pelatihan dasar)	Persen	100	100	100	100
C. INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH						
1.	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	Persen	84,52	91,89	91,90	91,90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 yang sangat erat kaitannya dengan proses penetapan arah dan kebijakan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 merupakan pedoman bagi unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026, akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Selanjutnya disusunlah rencana kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-BKPSDM) agar terarah dalam upaya peningkatan pelayanan dibidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Tarutung, Desember 2024

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



**BENYAMIN NABABAN, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 198212122006041006**